

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anggara, S. (2018). *Kebijakan Publik* (Ke 2 ed.). Bandung, Indonesia: CV. Pustaka Setia.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2019). *Standar Pelayanan Dan Perawatan Dasar Kesehatan Perempuan Di Rutan, Lapas, dan LPKA*. Jakarta, Indonesia: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2022). *Data Statistik Pemasyarakatan Tahun 2022 Triwulan I*. Jakarta, Indonesia: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- Jumroh, & Pratama, Y. J. (2021). *Implementasi Pelayanan Publik Teori Dan Praktik*. Sumatra Barat, Indonesia: Insan Cendekia Mandiri.
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas* (Ke 1 ed.). Gorontalo, Indonesia: UNG Press.
- Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta. (2024). *Pedoman Pengorganisasian Klinik Pratama Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta*. Jakarta.
- Naamy, N. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar & Aplikasinya* (Ke 1 ed.). (Winengan, Penyunt.) Mataram, Indonesia: Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah LP2M UIN Mataram.
- Pramono, J. (2020). *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Ke 1 ed.). (Sutoyo, Penyunt.) Surakarta, Indonesia: UNISRI Press.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Interpretif, Interaktif, dan Konstruktif)*. Yogyakarta, Indonesia: Alfabeta Bandung.

JURNAL

- Akhirta, D., Nurcholis, H., & Wahyono, E. (2025). Analysis of the Implementation of Adequate Access to Health Care Based on a Human Rights Perspective: Case Study at Class II A Penitentiary in Padang, Indonesia. *GOLDEN RATIO OF SOCIAL SCIENCE AND EDUCATION*, 167-179.

Monika Lisa Paramita, 2026

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN KESEHATAN SEBAGAI PEMENUHAN HAK KESEHATAN BAGI NARAPIDANA PEREMPUAN HAMIL DAN MENYUSUI DI LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA JAKARTA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

- Bancroft, X., Parayre, A. F., McGee, A., Morgan, L., & Peterson, W. (2025). "Is that a policy thing or is that a guard thing?" : A qualitative study of providers' experiences supporting pregnant individuals incarcerated in Ontario, Canada. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 1-18. doi:<https://doi.org/10.1186/s12884-025-07696-9>
- Dewi, N. P. (2025). Pelaksanaan Hak Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan dari Perspektif Keadilan. *Bhirawa Law Journal*, 46-56.
- Guntara, B., & Kusumawardhani, S. (2024). Perlindungan Hak Terhadap Narapidana Perempuan Menyusui di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang). *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 71-80.
- Hidayat, R. (2016). Hak Atas Derajat Pelayanan Kesehatan Yang Optimal. *SYARIAH Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 16(2), 131.
- Irawan, B., Isharyanto, & Hartiwiningsih. (2017). Pemajuan Hak Atas Kesehatan Reproduksi Bagi Perempuan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen. *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, v(1), 136.
- Jumalia. (2017). Peran Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Narapidana Untuk Memperoleh Pelayanan Kesehatan Yang Layak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak). *Jurnal Tesis*.
- Majid, I., Mote, H., & Jaya, A. (2024). Analisis Yuridis Hak Kesehatan Perempuan dalam Perspektif Hukum. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 3993-4004.
- Making, I. L. (2006). Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. 4(1), 139.
- Nurjanah, S., Suharso, & Kurniaty, Y. (2025). Implementasi Pelayanan Hak Kesehatan Reproduksi Bagi Warga Binaan Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Malang. *Borobudur Law and Society Journal*, 68-77.
- Phyu, S. Z. (2021). Public Policy and the Challenge of Health Care Services to Women prisoners in Myanmar. *REVIEW OF HUMAN RIGHTS*, 12-22. doi:10.35994/rhr.v7i1.185
- Putra, E. A., Aibekob, M., Manalu, B. R., Soge, M. M., & Santoso, I. (2024). Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Narapidana Di Tinjau Dari Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan . *Journal of Correctional Studies*, 3.
- Rifa'i, A., & Subroto, M. (2021). Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Umum Bagi Narapidana Perempuan. *Jurnal Intelektualita : Keislaman, Sosial, dan Sains*, 10(2), 266.

- Rights, O. O. (2000). CESCR General Comment No. 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health (Art. 12) . *Adopted at the Twenty-second Session of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, on 11 August 2000* .
- Subroto, M., & Ruwanda, j. (2024). Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Narapidana Perempuan Hamil dan Menyusui di dalam Lembaga Pemasyarakatan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(5), 3857-3864.
- Utami, P. N. (2020). Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Langkat. *Jurnal HAM*, 11(3), 419-430.
- Wijaya, T. s., & Rahman, M. (2021). Pemenuhan Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup). *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7(1), 126.
- Zuhair, A. A. (2020). Optimalisasi Stakeholder Dalam Pelayanan Kesehatan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, XIII(II), 87.

SKRIPSI

- Arifat, N. (2018). Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Bagi Warga Binaan Perempuan Hamil (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta). (*Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*), 1-255.
- Dagi, O. F. (2017). Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sungguminasa Kabupaten Gowa. (*Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar*), 1-64.
- Susanti, Y. (2017). Pembinaan Keagamaan Narapidana Wanita Melalui Konseling Keagamaan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta Timur. 87-88
- Widyastuti, A. A. (2018). Implementasi Hak Dan Kewajiban Bagi Warga Binaan Wanita Hamil Atau Menyusui Dalam Menjalani Masa Hukuman Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta. (*Skripsi Universitas Islam Indonesia*), 1-93.

WEBSITE

Monika Lisa Paramita, 2026

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN KESEHATAN SEBAGAI PEMENUHAN HAK KESEHATAN BAGI NARAPIDANA PEREMPUAN HAMIL DAN MENYUSUI DI LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA JAKARTA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Ilmu Politik
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan . (2025, November). *SDP Publik*. Diambil kembali dari <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). *Webinar Save Mother Save The Nation*. Diambil kembali dari <https://lms.kemkes.go.id/courses/f5ce874c-e40f-43e2-96f4-eb396276787c>
- KPU Kabupaten Yahukimo. (2025). *Pengertian Legitimasi, Fungsi, dan Contohnya Dalam Pemerintahan*. Diambil kembali dari https://kab-yahukimo.kpu.go.id/blog/read/8525_pengertian-legitimasi-fungsi-dan-contohnya-dalam-pemerintahan
- Labkesmas Baturaja Direktorat Jenderal Kesehatan Primer Dan Komunitas Kementerian Kesehatan RI. (2020). *Cegah AKI dan AKB*. Diambil kembali dari <https://www.labkesmas-baturaja.go.id/read-cegah-aki-dan-akb>
- RI, E. M. (2026, Maret 11). *Layanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Kurang Memadai, Perlu Dapat Fasilitas BPJS*. Diambil kembali dari https://emedia.dpr.go.id/news/2026/03/11/layanan-kesehatan-bagi-warga-binaan-kurang-memadai-perlu-dapat-fasilitas-bpjs?utm_source=chatgpt.com
- World Health Organization. (2025). Diambil kembali dari Maternal Deaths: <https://www.who.int/data/gho/indicator-metadata-registry/imr-details/4622>

UNDANG-UNDANG

- Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. (2025). Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/316852/permen-imipas-no-1-tahun-2025>
- Pemerintah Republik Indonesia. (1995). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan*. Diambil kembali dari <https://bphn.go.id/data/documents/95uu012.pdf>
- Pemerintah Republik Indonesia. (1999). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak*

Warga Binaan Pemasyarakatan. Diambil kembali dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/54301/pp-no-32-tahun-1999>

Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*. Diambil kembali dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/218804/uu-no-22-tahun-2022>

Pemerintah Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Diambil kembali dari <https://peraturan.bpk.go.id/details/258028/uu-no-17-tahun-2023>

WAWANCARA

Asriyanti, Y. (2026, Mei 24). Implementasi Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Perempuan Hamil Dan Menyusui Dari Perspektif Komnas Perempuan. (M. L. Paramita, Pewawancara)

Marwati, L. (2026, April 29). Implementasi Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Perempuan Hamil Dan Menyusui. (M. L. Paramita, Pewawancara)

Mona. (2026, April 30). Implementasi Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Perempuan Hamil Dan Menyusui Di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta. (M. L. Paramita, Pewawancara)

Nona. (2026, April 30). Implementasi Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Perempuan Hamil Dan Menyusui Di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta. (M. L. Paramita, Pewawancara)

Suhesti, T. (2026, April 30). Implementasi Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Perempuan Hamil Dan Menyusui Di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta. (M. L. Paramita, Pewawancara)